

STRATEGI MENGHADAPI GERAKAN ISIS DAN ANCAMAN KEAMANAN DI INDONESIA

Abdul Ghafur Santuso

Program Studi Tadris IPS IAIN Jember

abdulsantuso@gmail.com

Eiliyah Rifaini

Program Studi Tadris IPS IAIN Jember

eilyahrifaini@gmail.com

Depict Pristine Adi

Program Studi Tadris IPS IAIN Jember

pdepik@gmail.com

Abstract

The writing of this scientific paper examines Strategies in dealing with the ISIS movement and world security threats in Indonesia. ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) is one of the organizations that uses various methods to establish a new and developing country in Iraq and Syria to expand its power throughout the world, bringing Islamic law through jihad. This paper aims to explain and understand the Strategy in dealing with the ISIS movement and security threats in Indonesia. By using the method of library research (library research) where writing collects information that is relevant to the problem that is the object of research studies. The results of this study explain that the strategy to deal with the ISIS movement because ISIS is very contrary to the character of Islam that promotes peace has become the government's obligation to protect the country and every citizen from the danger of all threats. and one of the strategies is the program that has been created by the Terrorism Prevention Coordination Forum (FKPT), protection of Human Rights (HAM), securing ideology. And also the Country Cooperation Strategy, namely in Southeast Asia, namely deradicalization which prioritizes soft approaches, by including elements of media, culture, education, and religion in order to explain the objective conditions of the ISIS organization as a terror organization that threatens human well-being.

Keyword: strategy, ISIS movement, security

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini mengkaji tentang Strategi dalam menghadapi gerakan ISIS dan ancaman keamanan dunia di Indonesia. ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) merupakan salah satu kelompok yang menggunakan berbagai macam cara untuk menegakkan negara baru dan juga berkembang di negara Iraq dan Syria dan mengekspansi kekuasaannya ke penjuru dunia, dengan cara berjihad menegakkan hukum syariah. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami Strategi dalam menghadapi gerakan ISIS dan ancaman keamanan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research) dimana penulisan mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek studi penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi menghadapi gerakan ISIS karena ISIS sangat bertentangan dengan watak Islam yang mengedepankan perdamaian telah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga negara dan setiap warga negara dari bahaya segala ancaman. dan salah satu strateginya yakni seperti program yang telah dibuat oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pengamanan ideologi. Dan juga Strategi Kerja Sama Negara-negara yakni di Asia Tenggara yakni deradikalisasi yang mengutamakan pendekatan lunak (*soft approaches*), dengan memasukkan unsur media, kebudayaan, edukasi, dan agama dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi obyektif organisasi ISIS sebagai organisasi teror yang mengancam keselamatan manusia.

Kata kunci: *strategi, gerakan ISIS, keamanan*

I. PENDAHULUAN

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) merupakan sebuah fenomena yang baru dalam sebuah dinamika lingkungan strategis global dan regional, khususnya di Timur Tengah. ISIS adalah sebuah kekuatan aktor non-negara berkembang dengan tumbuh menjadi kekuatan yang mampu menyaingi, bahkan mampu mengalahkan suatu negara-negara serta menjadikan ISIS sebagai kekuatan yang harus diperhatikan oleh negara-negara dan masyarakat di dunia. ISIS sampai saat ini dikenal sebagai gerakan Islam radikal kontemporer secara geografis yang tersebar di seluruh wilayah Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropa dan Afrika.

Sebagai pergerakan politik, ISIS adalah suatu produk dinamika politik regional di Timur Tengah. ISIS mampu mewujudkan cita-citanya yakni mendirikan sebuah Negara kekhalifan Islam yang didalamnya terdapat Syariah Islam dan diterapkan secara radikal dan juga eksklusif. ISIS bisa melakukan berbagai kegiatan aksi-aksi bersenjata melawan pemerintahan di Irak dan Syuriah dan menelan korban jiwa berpuluh-puluh ribu orang dan harta benda yang sangat besar di wilayah kedua Negara (Aswan Haryadi, 2017).

Ancaman-ancaman keamanan dunia hadir dengan seiring kemunculan dan pergerakan ISIS dalam mengupayakan kepentingan untuk menciptakan negara Islam. Dan kejahatan mereka telah menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia dan keamanan negara juga Indonesia. ISIS suatu hal yang mengancam kehidupan masyarakat baik didalam negeri maupun dunia. Dan yang menjadikan ISIS suatu ancaman, keamanan memberikan dampak kepada *human security* dan *national security* (Aswan Haryadi, 2017).

Sebuah Ketakutan terror dan radikalisme telah sampai di Indonesia dengan meledaknya beberapa peristiwa berdarah juga kekerasan atas nama agama yang dikelola oleh kelompok-kelompok radikal Islam (Robingaton, 2017). Beberapa peristiwa terjadi seperti peristiwa teror pemboman yang di Legian Kuta Bali yang menelan korban hingga ratusan orang, tragedi Ahmadiyah di Cekuesik-Banten, perusakan gereja gereja yang ada

di Temanggung JawaTengah, pengeboman gereja-gereja pada waktukegiatan upacara keagamaan, hingga beberapa teror dalam bentuk demonstrasi dan sebuah aksimassa yang mengatasnamakan isu penistaanagama dan SARA hingga beberapa waktu lalu sampai menghantarkan suhu kerukunan antarumat beragama.

Sejak kemunculan sebuah gerakan teror yang berada di Indonesia, keberadaannya lebih dikaitkan dengan adanya sebuah kelompok Jamaah Islamiah (JI) yaitu kelompok radikal islam yang dianggap menjadi ancaman serius bagi keamanan di Asia Tenggara. Semua itu terjadi karena berdasarkan sebuah hasil identifikasi yang ada dari pihak kepolisian antara tahun 2002-2006, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa anggota JI adalah otak dan pelaku aksi teror di Indonesia. Keadaan itu sejalan dengan analisa Sidney Jones yang mengatakan bahwa kelompok teroris JI lebih berafiliasi al-Qeda bukan dengan ISIS. Menurut Sidney ISIS tidak terkait dengan para militan Indonesia yang lebih berafiliasi kepada JI. beberapa ada indikasi yang tertuju pada temuan bahwa teror tersebut didalangi oleh sebuah kelompok ISIS. Salah satunya dapat diketahui bahwa penyerangan itu direncanakan oleh seorang Bahrun Naim, WNI yang ingin memimpin sebuah kelompok ISIS di Asia Tenggara. Dan indikasi lain ialah adanya suatu informasi yang dimiliki kepolisian disana bahwa kelompok peretas Anonymous mengatakan Indonesia akan menjadi salah satu target penyerangan kelompok radikal ISIS berikutnya.

Sama juga dengan negara lain, Indonesia juga menemui sebuah tantangan dalam mengungkapkan keberadaan suatu jaringan teror dalam negaranya. Terutama jaringan militan ISIS yang semakin meresahkan. Eksistensi ISIS di Indonesia sangat mengganggu kedamaian dan keamanan di Indonesia. Setiap tahunnya ISIS berkembang pesat dan menjadi sebuah kekuatan global baru. Kemampuan mereka yang mampu merekrut pejuang-pejuang dari berbagai negara asing sangatlah tinggi baik termasuk Indonesia. Pemerintah sangat perlu meningkatkan strategi jitu dalam penanganan terorisme di Indonesia. Pemerintah perlu mengoptimalkan sebuah sistem pendeteksian dini terhadap potensi besar munculnya aksi teror oleh kelompok ekstrimis di Indonesia terutama terhadap kelompok yang berafiliasi kepada ISIS.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memahami strategi dalam menghadapi gerakan ISIS sebagai ancaman keamanan di Indonesia danKerja Samadan Strategi Beberapa Negara Dalam Menghadapi ISIS.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pendekatan normativitas dan historisitas dapat dijadikan sebuah landasan filosofis atau kerangka teoritis untuk membongkar dan melakukan pembacaan secara mendalam terhadap gerakan ISIS. Dalam KBBI W.J.S. Poerwadaminta mengatakan *historis* adalah kejadian dan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Definisi itu terlihat cukup menekankan kepada materi peristiwanya dan tidak mengaitkan dengan aspek lain. Sedangkan pengertian mengenai komprehensif yakni suatu peristiwa sejarah sangat perlu dilihat siapa yang melakukan peristiwa itu di mana, kapan dan juga mengapa peristiwa itu harus terjadi. Sedangkan kata *normatif* berasal dari bahasa Inggris *norm* yang berarti: norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (W.J.S. Poerwadaminta, 1972).

Dalam konteks pembahasan tentang ISIS, sisi historisitas adalah bentuk sejarah bagaimana sebenarnya ISIS itu hadir dan melakukan serangkaian gerakan guna mencapai suatu ambisi dan cita-citanya. Sedangkan sisi normativitas adalah sebuah aturan baku dalam ajaran

Islam baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, *ijma'* para ulama, *qiyas*, juga norma-norma yang diakui keabsahannya dalam peradaban Islam, dan menjadi dasar gerakan ISIS. Normativitas itu sendiri tentu tidak dapat dilepaskan dari ISIS. Karena selama ini ISIS mengklaim sebagai kelompok yang memperjuangkan suatu misi berdasarkan norma-norma dalam ajaran Islam.

Pendekatan normativitas dan historisitas dalam mengkaji ISIS tidak hanya akan memunculkan suatu gambaran penafsiran tentang dogmatika di dalam tubuh ISIS melainkan kepentingan, kondisi, maupun *prejudice* mendasari kelahiran ISIS dengan segala cita-cita yang mampu diperjuangkannya, dan kini telah menanamkan pengaruh cukup kuat di berbagai negara di dunia.

Menurut Louay Safi (1996) dengan kedua pendekatan itu, dapat ditarik kesimpulan apakah ISIS yang selama ini melakukan gerakan radikal dengan beberapa serangkaian penyerangan bersenjata memang sesuai dengan Islam dan sosial (*shari'ah and social inference*) atau justru sebaliknya. Pendekatan ini berusaha menjembatani antara, normativitas teks Ilahi dengan historisitasrealitas empiris berkaitan dengan gerakan ISIS menggunakan cara "memadukan" pendekatan tekstual (normatif) dan pendekatan kontekstual (historis-empiris) secara simultan.

Melalui pendekatan normativitas dan historisitas sebagai landasan filosofis ataupun kerangka teoritis guna membongkar dan melakukan pembacaan secara kritis terhadap ISIS, maka akan muncul pandangan tentang gerakan ISIS dari paradigma idealis ke paradigma yang bersifat empiris dan juga mendunia. Dalam suatu doktrin yang dikembangkan ISIS perlu sekiranya dibenturkan dengan konteks kekinian secara faktual.

Menurut Hasnan Habib yakni keamanan nasional perpaduan atau gabungan antara, keamanan wilayah (pertahanan) dan keamanan manusia. Dengan penggabungan itu, maka keamanan nasional merupakan keamanan yang bersifat menyeluruh. Adapun penjabarannya yaitu:

1. Keamanan Teritorial (wilayah)

- a. Ancaman terhadap Keamanan Negara atau Keamanan Teritorial (kedaulatan, integritas wilayah nasional dan Iuar/ external threat)
- b. Dimensi Militer
- c. Sarana utama penanggulangan dari Kekuatan Militer (senjata) dikerahkan di medan perang (front militer).

2. Keamanan Manusia

- a. Ancaman langsung terhadap manusia (individu, masyarakat, bangsa), meliputi: kelaparan, kemiskinan, kebodohan, penyakitmenular (AIDS), pengangguran, power abuse, degradasilingkungan, kejahatan (terutama organized crime), konflik SARA, terorisme, kekerasan politik, perilaku hukum rimba, dan diskriminasi
- b. Dimensi non-militer; meliputi: sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, kemanusiaan
- c. Sarana penanggulangan: diarahkan kepada kekuatan sosial, budaya, politik, HAM dan lingkungan hidup. (Debora Sanur L, 2016).

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library research). Disebut dengan penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan atau digunakan dalam menyelesaikan suatu penelitian ini berasal

dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Nur Sapia, 62).

Menurut mardalis penelitian kepustakaan merupakan salah satu bertujuan untuk mengumpulkan data juga informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan. Penelitian ini mencakup, gagasan dan teori yang saling berkaitan serta didukung dengan data-data dari sumber pustaka sebagai bahan kajian yakni berupa sebuah jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi Sumber pustaka sebagai bahan kajian yakni berupa sebuah jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi (A. Rifqi Amin, 2020).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anthony Richards berpendapat bahwa terorisme selalu diklasifikasikan berdasarkan ideology atau sistem kepercayaan para pelakunya, seperti terorisme nasionalis atau terorisme separatis. Terorisme agama (*religious terrorism*), terorisme sayap kanan (*right wing terrorism*), dan terorisme isu tunggal (*single issue terrorism*). Richards juga memaparkan semua ideologi itu memiliki pengaruh langsung terhadap jaringan terorisme. Salah satunya yaitu kasus seperti Al Qaeda terorisme dan Irish Republicanism melakukan sebuah aksi separatisme yang berdasar pada pandangan ideologi Republikan, kekerasan politik sebagai suatu tugas agama (*religious duty*) (Sidratahta Mukhtar, 2017).

Terorisme bisa berkembang pesat sebab adanya revolusi teknologi informasi global. Seperti taktik terorisme yang menggunakan media publik sebagai alat propaganda untuk memudahkan penguatan jaringan nasional dan internasional. Media yang digunakan Terorisme memaksa para pelaku Negara atau elit penguasa untuk dapat memperhatikan lebih jauh apa tujuan dibalik aksi kejahatan yang mereka lakukan. Revolusi informasi yang ditandai dengan munculnya sebuah perubahan pola komunikasi masyarakat modern yang berbasis teknologi informasi seperti Smartphone, WA, Blackberry, Instagrams, Facebook dan Twitters. Tampaknya, revolusi ilmu pengetahuan yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sedang berlangsung cepat (*speed*) dalam semua bidang kehidupan (*space*) dan trend tersebut di ikuti oleh terorisme global.

Menurut Sidratahta Mukhtar (2017) Awal mula ISIS didirikan dengan visi regional Timur Tengah, khususnya untuk Irak, Suriah, Yaman, UEA, Jordania, Turki, Lebanon. Dalam perkembangannya, ISIS ditujukan untuk dikembangkan secara global pasca deklarasi pemimpin ISIS yang baru, Abu Bakar Al- Baghdadi dipenghujung tahun 2014. Karena itu, ISIS berubah menjadi Islamic State (IS). Dukungan deklarasi di dapat dengan cepat dari berbagai tokoh dan sel-sel terorisme seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara. Krisis di Irak dan Suriah dalam gelombang “*Arab Springs*” turut membawa banyak korban jiwa di mana ribuan umat Islam dan komunitas non muslim terusir dan dibunuh dan menjadi korban.

Awal mula keberadaan ISIS di Indonesia diketahui sejak adanya deklarasi di Gedung Syahida Inn milik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 6 Juli 2014. Didalam deklarasi mereka menamakan kelompoknya dengan nama “Penegak Syariat Islam” yang menyatakan dukungan kepada ISIS serta menggunakan bendera ISIS dalam deklarasinya.

Para simpatisan yang ingin ikut berjuang bersama ISIS semakin bermunculan Setelah adanya deklarasi ISIS di Indonesia. Di dalam negeri, ISIS mendapat banyak dukungan dari kelompok-kelompok kecil. Mereka adalah simpatisan yang menyatakan dukungan dengan membentuk kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Salah satunya seperti serangan bom di Sarinah Jakarta yang dilakukan Bahrin Naim. Serangan itu telah

dikoordinasikan dengan sebuah kelompok di Solo, Jawa Tengah. Kelompok yang ada di Solo hanya satu dari beberapa kelompok yang ada di Indonesia yang berafiliasi dengan ISIS. ISIS di Indonesia memiliki banyaknya simpatisan yang membuat kondisi keamanan nasional Indonesia menjadi terancam. Bukan hanya karena aksi terornya yang sangat meresahkan masyarakat, namun juga karena ideologi yang mereka anut. Pada kenyataannya, saat ini keberadaan ISIS di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

ISIS menggunakan doktrin takfiri dengan menggunakan konsep tauhid. Artinya, bagi mereka tidak menggunakan konsep maka akan dianggap boleh dihancurkan atau dibunuh. Abubakar Al Baghdadi melanjutkan pemahaman dengan meniru cara kehidupan termasuk konsep perang Nabi Muhammad SAW dalam konteks yang disamakan dengan kondisi saat ini. Hal yang ditiru ISIS dari Nabi Muhammad SAW di antaranya ialah hijrah. Hijrah yang dilakukan ISIS yakni dari berbagai negara ke Suriah. Selanjutnya, ISIS menggunakan Suriah sebagai Qoidah Aminah meniru Nabi Muhammad yang telah menjadikan Madinah sebagai Qoidah Aminah.

Gerakan ISIS sangat bertentangan dengan watak Islam yang mengedepankan perdamaian dan dialog, bukan hanya kekerasan dan perang. ISIS itu merupakan bentuk lanjutan dari Islam radikal lama dengan sebuah label baru. Disebut label baru sebab ISIS juga menjadikan saudara semuslimnya sebagai musuh dan target aksi radikalnya bila tidak sejalan dengan mereka. Mereka mengklaim hanya kelompok mereka yang benar. Bahaya dari ISIS yang paling menakutkan adalah bagi mereka kelompok Islam di luar dirinya bukanlah Islam, oleh karenanya harus diperangi, dibunuh, dan dimusnahkan. Hal ini, anggota ISIS memberikan dua pilihan kepada umat Islam di luar kelompoknya, yaitu bergabung ke dalam “Islam” ISIS atau akan dibunuh. ISIS juga memiliki sebuah kebijakan yakni mengeluarkan “Kartu Tanda Bukan Kafir” (KTBK) yang diwajibkan bagi siapa saja yang baru bergabung atau memulai dengan ISIS (Debora Sanur L). ISIS sebagai sebuah fenomena yang telah mengancam kehidupan masyarakat luar. Hal lain yang menjadikan ISIS sebagai ancaman keamanan yang memberikan dampak kepada *human security dan national security* (Aswan Haryadi & Nurhasanah Muthia, 2017).

1. Strategi Dalam Menghadapi Gerakan ISIS Sebagai Ancaman Keamanan Dunia Di Indonesia

Data yang dihimpun tempo (20/01/2016) menyebutkan 2,7 juta rakyat Indonesia telah bergabung dengan teroris dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan 10-12 jaringan inti terorisme. Para teroris yang berkembang di Indonesia, telah dimulai sejak masa orde baru (1981), teroris sudah masuk Indonesia. Tahun 2002 tampak tegang pula dengan aksi yang diluncurkan Umar Patek, Amrozi, Imam Samudra, Nurdin M. Top, dkk (Suprpto, 2018).

Kebijakan-kebijakan pemerintah menghadapi terorisme ISIS ada empat fungsi yang menjadi pilar utama sistem keamanan nasional komprehensif, yaitu sebagai berikut: 1. Pertahanan negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI. 2. Keamanan negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri. 3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan pengayoman,

dan pelayanan masyarakat. 4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara.

Berdasarkan fungsi diatas bisa diartikan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga negara dan setiap warga negara dari bahaya segala ancaman. Pemerintah harus turut serta dalam mengupayakan mendeteksi dini juga menangkal setiap adanya ancaman. Ancaman juga bisa berarti hal yang mengganggu kedaulatan ataupun keselamatan suatu bangsa, hingga hal yang dapat mengganggu hak-hak dasar setiap warga negara. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatasi dan membrantas sejak dini setiap adanya gerakan radikal dan terorisme yang berpotensi menimbulkan teror dalam bangsa dan masyarakat.

Keberadaan sumber daya yang dimiliki pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan terorisme seharusnya semakin ditingkatkan. Ada Beberapa sumber daya yang dimiliki yakni, sumber daya finansial negara, modal kekuatan politik khususnya politik masyarakat, kapasitas organisasi anti terorisme serta perangkat regulasi yang mengatur tentang penanganan terorisme di Indonesia.

Adanya beberapa program yang perlu ditingkatkan terutama terkait pendeteksian dini gerakan teror. Salah satunya program yang telah dibuat oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Dalam program itu adanya warga yang tergabung dalam FKPT dan mengajukan permintaan dana kepada BNPT untuk mengadakan kegiatan pencegahan teror. Pemerintah juga berperan dalam merevisi pengaturan terkait terorisme.

Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 15 Tahun 2003 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Terorisme merupakan: "Tindak pidana Terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau hilangnya harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, ataupun lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional". Undang-Undang terorisme hadir memicu pro dan kontra terutama terkait pandangan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok kontra tidak setuju dengan pengingkaran terhadap perlindungan HAM pelaku teror. Di lain pihak, kelompok pro tidak setuju dengan pendekatan perlindungan HAM korban. Kelompok pro, sebagaimana masyarakat awam menilai teror merupakan ancaman bagi hak-hak individu seperti hak untuk hidup, bebas dari rasa takut, maupun hak-hak kolektif lainnya seperti ketentraman masyarakat madani, keamanan nasional dan stabilitas nasional,

Pengamanan ancaman dari kelompok teror ISIS pemerintah Indonesia memerlukan pengamanan fisik dan pengamanan ideologi. Pengamanan fisik perlu dilakukan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, terutama pada tempat-tempat vital. Hal ini sangat penting, sebab dalam aksinya teroris cenderung memiliki yang relatif sama dalam menentukan suatu lokasi ledakan bom. Lokasi yang bersifat selebritis menjadi target utama teroris. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi simbol pemerintahan, simbol kekuasaan, dan simbol ekonomi. Menghancurkan suatu lokasi tersebut maka para pelaku teror meninggalkan kesan telah berhasil dan mampu menghancurkan simbol-

simbol tersebut. Kemudian aksi tersebut akan berdampak psikologis pada masyarakat karena di beritakan terus menerus dalam media massa. Salah satu contoh yakni teror bom bali yang meruntuhkan simbol Bali sebagai sebuah kawasan wisata teraman dan aman bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Berdasarkan hal tersebut informasi penting mengenai lokasi atau kawasan eksklusif yang ada unsur asing seperti perusahaan asing, restoran, hotel atau cafe yang sering dikunjungi orang asing tentu sudah diketahui oleh para teroris. Dengan demikian obyek vital nasional termasuk istana negara dapat menjadi sasaran utama teroris. Maka dari itu untuk mengeliminasi ruang gerak teroris dan aparat pengamanan harus melakukan pengamanan secara terbuka dan tertutup secara intensif terhadap lokasi yang dianggap strategis untuk dituju.

Sementara itu pengamanan ideologi juga perlu dilakukan agar masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh dengan paham paham radikalisme yang menjual nama agama. Ideologi bangsa sebagai negara kesatuan harus terus dipertahankan. Namun demikian hal tersebut cukup sulit diantisipasi oleh negara adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak terpengaruh dengan ideologi ISIS. Hal itu menjadi penting agar masyarakat tidak tertarik untuk bergabung dengan kelompok teroris tersebut.

Menurut Asep Setiawan (2017) kalau pencegahan dilakukan secara intensif oleh pemerintah maka jumlah pendukung ISIS akan berkurang dari tahun ke tahun. Namun keberhasilan program pencegahan juga tergantung variabel kekuatan ISIS di Timur Tengah.

2. Kerja Sama dan Strategi Beberapa Negara Dalam Menghadapi ISIS

Perkembangan kelompok ISIS dalam penyebaran ideologi tidak hanya menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, namun juga lingkup Internasional. Pengaruh ISIS yang mengancam masyarakat bahkan kedaulatan dan ketentraman negara sangat dirasakan khususnya di wilayah Asia Tenggara sehingga respons dari pemerintah selaku pelaksana negara perlu reaktif, responsif dan preventif (Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti, 2017).

Ancaman terorisme regional salah satu contohnya di Asia Tenggara memiliki kesamaan ancaman antara Singapura, Malaysia dan Indonesia. oleh karena itu pemerintah Malaysia dan Indonesia membutuhkan adaptasi terhadap sistem dan pendekatan penanggulangan terorisme kedua negara itu dengan mengupayakan seperti strategi deradikalisasi yang mengutamakan pendekatan lunak (*soft approaches*), dengan memasukkan unsur media, kebudayaan, edukasi, dan agama dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi obyektif organisasi ISIS sebagai organisasi teror yang mengancam keselamatan manusia. Selain mengedepankan pendekatan keamanan yang humanistik, Malaysia dan Indonesia juga perlu bekerjasama dengan masyarakat sipil dengan lembaga-lembaga keamanan pemerintah. Kelompok-kelompok teroris ini membangun jaringannya di Asia Tenggara dengan menggunakan internet yang semuanya secara bersama-sama proaktif hadir dalam aksi teror di Irak dan Suriah. Saat ini pelatihan para anggota-anggota teroris dilakukan di Timur Tengah dan kembalinya mereka sangat dikhawatirkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa negara juga meminimalisir ancaman terorisme, radikalisme dan perkembangan ISIS, telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan, strategi dan regulasi yang sebelumnya beberapa negara juga mengakui merebaknya ISIS juga disebut sebagai 'intelligence failure' yang terjadi di beberapa negara target ISIS.

Salah satunya Negara Malaysia sedang menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang (UU) Pencegahan Kegiatan Terorisme (The Prevention of Terrorism Activities/POTA), yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah kegiatan teror yang dilakukan oleh anggota ISIS dan teroris yang lain baik dari dalam maupun luar Malaysia. Pihak yang berwenang yakni RUU akan untuk menahan tersangka teroris selama 2 tahun dengan kemungkinan perpanjangan 2 tahun.

Kemudian Pemerintah Pakistan juga meningkatkan kerja sama pertukaran informasi intelijen dengan beberapa negara sebagai usaha preventif masuknya pengaruh ISIS ke Pakistan. Langkah tersebut dilakukan karena adanya sinyalemen bahwa beberapa tokoh dari kelompok radikal di Pakistan telah bergabung kepada ISIS, di antaranya mantan Jubir kelompok Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), Shahidullah Shadid.

Kepala Staf Gabungan Jenderal Martin Dempsey Di New York, Menhan Ash Carter dan Menlu John Kerry meminta Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS memberi wewenang lebih besar kepada Presiden AS, Barack Obama untuk memerangi ISIS.

Kemudian di lanjut dengan Pemerintah Prancis memperpanjang kebijakan khusus tentang anti-terorisme hingga awal Juli 2015. Menhan Jean-Yves Le Drian berpendapat Prancis akan memberlakukan kebijakan anti-terorisnya selama diperlukan, mengingat tingkat ancaman terorisme terhadap Prancis masih tetap tinggi. Kebijakan anti-terorisme yang di berlakukan Prancis sejak Januari 2015, setelah terjadi serangan teror terhadap majalah Charlie Hebdo.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Jadi dapat diketahui bahwa ISIS menggunakan pendekatan takfiri dengan konsep Tauhid. Artinya, bagi orang yang tidak menggunakan konsep mereka, dianggap boleh dibunuh atau dihancurkan. ISIS sangat bertentangan dengan watak Islam yang mengedepankan perdamaian dan dialog, bukan kekerasan dan perang telah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga negara dan setiap warga negara dari bahaya segala ancaman. Persoalan menanggulangi masalah terorisme sudah seharusnya semakin ditingkatkan dan salah satu caranya dengan menggunakan strategi untuk menghadapi gerakan ISIS di Indonesia yakni Salah satunya seperti program yang telah dibuat oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pengamanan ideologi. Dan juga Strategi Kerja Sama Negara-negara yakni di Asia Tenggara yakni deradikalisasi yang mengutamakan pendekatan lunak (*soft approaches*), dengan memasukkan unsur media, kebudayaan, edukasi, dan agama dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi obyektif organisasi ISIS sebagai organisasi teror yang mengancam keselamatan manusia. Beberapa negara juga meminimalisir ancaman terorisme, radikalisme dan perkembangan ISIS, telah melakukan sejumlah terobosan dan inovasi kebijakan, strategi dan regulasi seperti negara Amerika Serikat, Pakistan dan Prancis

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Haryadi, Aswan, 2017, *Gerakan Politik Negara Irak dan Suriah (ISIS) DAN Pengaruhnya Terhadap Indonesia*, Jurnal Transborders

p-ISSN : 2655-7304

e-ISSN : 6655-8953

- [2] Mukhtar, Sidratahta. 2017. *Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS*, Jurnal Ilmu Kepolisian
- [3] Nursapia. 2008, *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra'
- [4] Poerwadaminta, W.J.S. 1972. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional
- [5] Rifqi, Amin, A. "*Penelitian Kepustakaan (Library Research)*" diakses pada tanggal 30 Maret
- [6] Robingaton, 2017, *Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan*, Jurnal Empirisma
- [7] Safi, Louay. 1996, *The Foundation of Knowledge a Comparative Studying Islamic and Western Methods of Inquiry* Selangor: IIU & IIIT
- [8] Sanur, L, Debora, 2016, Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia. *Politica* Vol. 7 No. 1
- [9] Asep Setiawan, 2018, Kebijakan Pencegahan Gerakan Isis Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol 1 No 1.
- [10] Novie Lucky Andriyani Dan Feriana Kushindarti, 2017, Respons Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan Islamic State Di Indonesia *Jurnal Penelitian Politik* Vol 14 No. 2
- [11] Aswan Haryadi & Nurhasanah Muthia, 2017, Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (Isis) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia *Jurnal Transborders* Vol. 1 No. 1
- [12] Suprpto, 2018, Aksi Terorisme: Dari Gerakan Ideologis Ke Gerakan Inkonstitusional, *Volume 12, Nomor 2*
- [13] [https:// www/notes/muhammad-a-s-hikam/isis-sebagai-ancaman-dunia-i-genealogi-dan-perkembangan/10153104852531262/? rdc=1& rdr](https://www.notes/muhammad-a-s-hikam/isis-sebagai-ancaman-dunia-i-genealogi-dan-perkembangan/10153104852531262/?rdc=1&rdm=1) diakses tanggal 30 Maret 2020
- [14] <https://news.detik.com/kolom/d-2863246/merespons-isis-belajar-dari-strategi-negara-lain> Di akses tanggal 01 April 2020